



BUPATI ENREKANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN ENREKANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENREKANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 15);
 7. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 56);
 8. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN ENREKANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Enrekang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau yang di singkat dengan SKPD adalah Badan atau Dinas yang menangani proses pengelolaan Alokasi Dana Desa;
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

- hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 14. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 15. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
 16. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

17. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
18. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya.
19. Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
20. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
21. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang PemerintahanDesa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
22. Rekening Kas Umum Daerah,yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan
23. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
24. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
25. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
26. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pedapatan desa dengan belanja desa.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
29. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 90 % sebagai alokasi Dasar dengan besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa; dan
- b. alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 10 % sebagai alokasi formula yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yaitu:
 1. Kemiskinan;
 2. Luas Wilayah;
 3. Jumlah penduduk; dan
 4. Indeks kesulitan geografis setiap Desa.

Pasal 4

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) yang disebut sebagai alokasi formula sebgaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf b, dengan bobot sebagai berikut:

- a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
- b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
- c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
- d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk Indeks kesulitan geografis.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan Indeks Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kab. Enrekang.

Pasal 6

Menghitung Aloaksi Dana Desa setiap Desa se Kabupaten Enrekang dengan urutan sebagai berikut :

1. Menghitung bagian ADDM setiap Desa dengan rumus :

$$ADDM = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa se Kab. Enrekang}}$$

2. Menghitung bagian ADDP setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

- a. Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rumus:

$$Rasio\ JP = \frac{\text{jumlah penduduk desa}}{\text{total penduduk kabupaten Enrekang}}$$

- b. Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rumus:
$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

- c. Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus:

$$Rasio\ JPM = \frac{\text{jumlah penduduk miskin desa}}{\text{total penduduk miskin kabupaten Enrekang}}$$

- d. Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

- e. Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dengan rumus:

$$Rasio\ LW = \frac{\text{luas wilayah desa}}{\text{total luas wilayah Kab Enrekang}}$$

- f. Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

- g. Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dengan rumus:

$$Rasio\ IKG = \frac{IKG}{\text{total IKG Desa Kab. Enrekang}}$$

- h. Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

- i. Total bobot dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

Bagian ADDP dengan rumus:

$$ADDP = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian ADDP}$$

3. Menghitung Aloaksi Dana Desa setiap Desa dengan rumus:

$$\text{Alokasi Dana Desa (ADD)} = \text{ADDM (alokasi Dasar)} + \text{ADDP (Alokasi Formula)}$$

Pasal 7

- (1) ADD dipergunakan untuk :
- penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan pengurus BPD;
 - membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan jabatan dan pengurus BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati

- (3) Penggunaan ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap dan tunjangan jabatan, digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 8

Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam APBDesa sesuai jumlah ADD yang diterima suatu Desa dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 9

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q Kepala DPMD setelah disetujui oleh camat dengan melampirkan :
- a. foto copy Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun berjalan yang dilampiri dengan Berita Acara Musyawarah Desa
 - b. foto copy RPJMDes dan RKPDes Tahun berjalan beserta lampirannya
 - c. surat pernyataan tanggungjawab
 - d. pakta integritas
 - e. foto copy Rekening Desa
 - f. laporan realisasi Penggunaan Dana Tahap sebelumnya;
- (2) Permohonan pencairan ADD bersama lampirannya disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Penyaluran dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan Dana Desa Transfer yang bersumber dari APBN yang tertuang dalam APB Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa pada Pos Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa.

Pasal 12

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017 NOMOR 12

CHARUL LATANRO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

Ditandatangan di Enrekang
Pada tanggal 19 April 2017

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 19 April 2017

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangan.
Agar setiap orang mengertiinya, merekrutahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang



Pasal 14

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat Pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum ramalan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagaimana wajib punya tanda tangan APBDesa rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan penetapan potongan dan pajak yang dipungutnya ke seluruh (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyatakan seluruh Agar setiap orang mengertiinya, merekrutahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang

Pasal 13

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ENREKANG
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
PAGU ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2017

PAGU ALOKASI DANA DESA KABUPATEN ENREKANG TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (ADDM)	Alokasi Berdasarkan Formula (ADDP)												Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografis	Rasio Indeks Kesultanan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
1	KEC. MAIWA	4,725,000,000														454,515,108	5,179,516,000
1	PATONDON SALU	225,000,000	2108	1.424%	0.356%	92	0.143%	0.050%	28.61	1.72%	0.17%	26.38	0.627%	0.188%	0.77%	21,442,945.00	246,443,000
2	TUNCUNG	225,000,000	1278	0.863%	0.216%	294	0.456%	0.159%	6.62	0.40%	0.04%	41.37	0.984%	0.295%	0.71%	19,883,480.11	244,883,000
3	PASANG	225,000,000	801	0.541%	0.135%	404	0.626%	0.219%	10.69	0.64%	0.06%	26.57	0.632%	0.190%	0.61%	17,026,076.65	242,026,000
4	SALODUA	225,000,000	1151	0.777%	0.194%	181	0.280%	0.098%	20.13	1.21%	0.12%	38.45	0.915%	0.274%	0.69%	19,256,367.54	244,256,000
5	BATU MILA	225,000,000	1565	1.057%	0.264%	877	1.359%	0.476%	10.61	0.64%	0.06%	39.73	0.945%	0.284%	1.09%	30,436,165.28	255,436,000
6	PUNCAK HARAPAN	225,000,000	756	0.511%	0.128%	227	0.352%	0.123%	14.08	0.85%	0.08%	29.68	0.706%	0.212%	0.55%	15,317,481.78	240,317,000
7	PALAKKA	225,000,000	591	0.399%	0.100%	392	0.607%	0.213%	28.62	1.72%	0.17%	35.36	0.841%	0.252%	0.74%	20,622,795.44	245,623,000
8	TAPONG	225,000,000	831	0.561%	0.140%	531	0.823%	0.288%	17.36	1.04%	0.10%	39.38	0.937%	0.281%	0.81%	22,777,309.90	247,777,000
9	MANGKAWANI	225,000,000	1073	0.725%	0.181%	906	1.404%	0.491%	12.50	0.75%	0.08%	38.90	0.925%	0.278%	1.03%	28,703,215.42	253,703,000
10	BOTTO MALANGGA	225,000,000	2234	1.509%	0.377%	559	0.866%	0.303%	23.75	1.43%	0.14%	23.31	0.554%	0.166%	0.99%	27,698,905.80	252,699,000
11	BOIYA	225,000,000	854	0.577%	0.144%	323	0.500%	0.175%	24.56	1.47%	0.15%	40.07	0.953%	0.286%	0.75%	21,077,399.74	246,077,000
12	MATAJANG	225,000,000	1035	0.699%	0.175%	642	0.995%	0.348%	48.82	2.93%	0.29%	38.30	0.911%	0.273%	1.09%	30,501,340.48	255,501,000
13	BARINGIN	225,000,000	1006	0.679%	0.170%	365	0.566%	0.198%	20.74	1.25%	0.12%	34.13	0.812%	0.244%	0.74%	20,603,863.91	245,604,000
14	LEBANI	225,000,000	827	0.558%	0.140%	789	1.222%	0.428%	17.70	1.06%	0.11%	33.48	0.796%	0.239%	0.91%	25,555,447.95	250,555,000
15	LIMBUANG	225,000,000	266	0.180%	0.045%	86	0.133%	0.047%	5.22	0.31%	0.03%	39.82	0.947%	0.284%	0.41%	11,396,286.60	236,401,000
16	PALADANG	225,000,000	875	0.591%	0.148%	701	1.086%	0.380%	10.44	0.63%	0.06%	50.08	1.191%	0.357%	0.95%	26,540,583.41	251,541,000
17	PARIWANG	225,000,000	502	0.339%	0.085%	155	0.240%	0.084%	10.33	0.62%	0.06%	36.72	0.873%	0.262%	0.49%	13,799,260.01	238,799,000
18	KALUPPANG	225,000,000	652	0.440%	0.110%	295	0.457%	0.160%	13.17	0.79%	0.08%	52.19	1.241%	0.372%	0.72%	20,202,390.29	245,202,000
19	ONGKO	225,000,000	870	0.588%	0.147%	321	0.497%	0.174%	11.31	0.68%	0.07%	44.29	1.054%	0.316%	0.70%	19,738,340.03	244,738,000
20	TANETE	225,000,000	516	0.348%	0.087%	163	0.253%	0.088%	18.58	1.12%	0.11%	57.07	1.357%	0.407%	0.69%	19,440,281.10	244,440,000
21	LABUKU	225,000,000	698	0.471%	0.118%	393	0.609%	0.213%	15.53	0.93%	0.09%	53.14	1.264%	0.379%	0.80%	22,495,171.22	247,495,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
	KEC. ENREKANG	2,700,000,000														359,989,153	3,059,988,000
22	RANGA	225,000,000	1035	0.699%	0.175%	1165	1.805%	0.632%	23.98	1.44%	0.14%	44.45	1.057%	0.317%	1.27%	35,494,257.35	260,494,000
23	BUTTU BATU	225,000,000	1591	1.074%	0.269%	775	1.201%	0.420%	31.50	1.89%	0.19%	29.07	0.691%	0.207%	1.09%	30,392,026.64	255,392,000
24	TOKKONAN	225,000,000	520	0.351%	0.088%	664	1.029%	0.360%	34.23	2.06%	0.21%	57.49	1.368%	0.410%	1.06%	29,783,119.17	254,783,000
25	KARUENG	225,000,000	1800	1.216%	0.304%	1097	1.700%	0.595%	8.40	0.50%	0.05%	45.10	1.073%	0.322%	1.27%	35,589,006.65	260,589,000
26	TALLU BAMBA	225,000,000	2042	1.379%	0.345%	1234	1.912%	0.669%	6.58	0.40%	0.04%	44.03	1.047%	0.314%	1.37%	38,292,262.73	263,292,000
27	TUNGKA	225,000,000	1600	1.080%	0.270%	261	0.404%	0.142%	43.44	2.61%	0.26%	26.59	0.632%	0.190%	0.86%	24,142,099.40	249,142,000
28	KALUPPINI	225,000,000	1089	0.735%	0.184%	841	1.303%	0.456%	31.18	1.87%	0.19%	39.22	0.933%	0.280%	1.11%	30,995,397.74	255,995,000
29	TOBALU	225,000,000	811	0.548%	0.137%	1088	1.686%	0.590%	17.68	1.06%	0.11%	58.46	1.391%	0.417%	1.25%	35,006,913.11	260,007,000
30	CEMBA	225,000,000	1166	0.787%	0.197%	331	0.513%	0.179%	9.20	0.55%	0.06%	35.65	0.848%	0.254%	0.69%	19,206,583.27	244,207,000
31	TEMBAN	225,000,000	830	0.560%	0.140%	428	0.663%	0.232%	13.54	0.81%	0.08%	30.03	0.714%	0.214%	0.67%	18,699,306.68	243,699,000
32	ROSOAN	225,000,000	1111	0.750%	0.188%	1200	1.859%	0.651%	13.00	0.78%	0.08%	38.77	0.922%	0.277%	1.19%	33,404,484.35	258,404,000
33	LEMBANG	225,000,000	781	0.527%	0.132%	723	1.120%	0.392%	13.50	0.81%	0.08%	60.28	1.434%	0.430%	1.04%	28,983,695.97	253,984,000
	KEC. BARAKA	2,700,000,000														303,397,458	3,003,398,000
34	BANTI	225,000,000	1584	1.070%	0.267%	890	1.379%	0.483%	7.36	0.44%	0.04%	27.41	0.652%	0.196%	0.99%	27,715,460.99	252,715,000
35	BONTONGAN	225,000,000	2704	1.826%	0.456%	876	1.357%	0.475%	22.74	1.37%	0.14%	26.46	0.629%	0.189%	1.26%	35,193,600.43	260,194,000
36	SALUKANAN	225,000,000	1168	0.789%	0.197%	644	0.998%	0.349%	17.16	1.03%	0.10%	24.55	0.584%	0.175%	0.82%	23,090,288.20	248,090,000
37	PARINDING	225,000,000	1528	1.032%	0.258%	1064	1.649%	0.577%	6.39	0.38%	0.04%	30.86	0.734%	0.220%	1.09%	30,619,686.87	255,620,000
38	TIROWALI	225,000,000	978	0.660%	0.165%	490	0.759%	0.266%	5.60	0.34%	0.03%	40.60	0.966%	0.290%	0.75%	21,116,046.49	246,116,000
39	PEPANDUNGAN	225,000,000	1267	0.856%	0.214%	72	0.112%	0.039%	19.16	1.15%	0.12%	38.84	0.924%	0.277%	0.65%	18,064,080.21	243,064,000
40	KENDENAN	225,000,000	1284	0.867%	0.217%	1291	2.000%	0.700%	18.82	1.13%	0.11%	26.32	0.626%	0.188%	1.22%	34,094,497.95	259,094,000
41	PERANGIAN	225,000,000	936	0.632%	0.158%	420	0.651%	0.228%	3.71	0.22%	0.02%	40.39	0.961%	0.288%	0.70%	19,495,675.49	244,496,000
42	JANGGURARA	225,000,000	1173	0.792%	0.198%	415	0.643%	0.225%	11.37	0.68%	0.07%	30.61	0.728%	0.218%	0.71%	19,873,667.62	244,874,000
43	KADINGEH	225,000,000	1264	0.854%	0.213%	921	1.427%	0.499%	12.13	0.73%	0.07%	37.26	0.886%	0.266%	1.05%	29,444,355.83	254,444,000
44	BONEBONE	225,000,000	839	0.567%	0.142%	338	0.524%	0.183%	19.17	1.15%	0.12%	39.58	0.941%	0.282%	0.72%	20,229,546.25	245,230,000
45	PANDUNG BATU	225,000,000	1172	0.791%	0.198%	722	1.119%	0.392%	2.75	0.17%	0.02%	37.51	0.892%	0.268%	0.87%	24,460,552.18	249,461,000
	KEC. ANGGERAJA	2,700,000,000														235,174,101	2,935,174,000
46	BAMBA PUANG	225,000,000	1976	1.334%	0.334%	366	0.567%	0.198%	9.20	0.55%	0.06%	22.67	0.539%	0.162%	0.75%	20,973,931.60	245,974,000
47	SIAMBO	225,000,000	1051	0.710%	0.177%	339	0.525%	0.184%	6.51	0.39%	0.04%	26.85	0.639%	0.192%	0.59%	16,574,441.60	241,574,000
48	MAMPU	225,000,000	1408	0.951%	0.238%	751	1.164%	0.407%	10.64	0.64%	0.06%	29.11	0.693%	0.208%	0.92%	25,664,889.60	250,665,000
49	PEKALOBEAN	225,000,000	1912	1.291%	0.323%	258	0.400%	0.140%	9.92	0.60%	0.06%	27.59	0.656%	0.197%	0.72%	20,136,727.28	245,137,000
50	SINGKI	225,000,000	1567	1.058%	0.265%	446	0.691%	0.242%	12.08	0.73%	0.07%	25.05	0.596%	0.179%	0.76%	21,214,602.62	246,215,000
51	SALU DEWATA	225,000,000	954	0.644%	0.161%	474	0.734%	0.257%	13.15	0.79%	0.08%	38.84	0.924%	0.277%	0.77%	21,677,144.23	246,677,000
52	TINDALUN	225,000,000	750	0.506%	0.127%	139	0.215%	0.075%	12.18	0.73%	0.07%	35.72	0.850%	0.255%	0.53%	14,840,035.82	239,840,000
53	BUBUN LAMBA	225,000,000	1297	0.876%	0.219%	314	0.487%	0.170%	4.33	0.26%	0.03%	27.91	0.664%	0.199%	0.61%	17,202,739.07	242,203,000
54	TAMPO	225,000,000	1009	0.681%	0.170%	519	0.804%	0.281%	7.45	0.45%	0.04%	36.57	0.870%	0.261%	0.76%	21,208,998.08	246,209,000
55	BATUNONI	225,000,000	2330	1.573%	0.393%	241	0.373%	0.131%	5.05	0.30%	0.03%	37.73	0.897%	0.269%	0.82%	23,059,938.21	248,060,000
56	SARURAN	225,000,000	983	0.664%	0.166%	436	0.676%	0.236%	4.10	0.25%	0.02%	26.32	0.626%	0.188%	0.61%	17,215,302.16	242,215,000
57	MENDATTE	225,000,000	690	0.466%	0.116%	409	0.634%	0.222%	6.00	0.36%	0.04%	24.65	0.586%	0.176%	0.55%	15,405,351.03	240,405,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
	KEC. ALLA	1,125,000,000														131,648,123	1,256,648,000
58	MATA ALLO	225,000,000	1207	0.815%	0.204%	753	1.167%	0.408%	4.15	0.25%	0.02%	37.53	0.893%	0.268%	0.90%	25,335,085.85	250,335,000
59	SUMILLAN	225,000,000	2331	1.574%	0.394%	377	0.584%	0.204%	5.81	0.35%	0.03%	32.91	0.783%	0.235%	0.87%	24,295,046.17	249,295,000
60	PANA	225,000,000	2600	1.756%	0.439%	1100	1.704%	0.597%	4.95	0.30%	0.03%	27.69	0.659%	0.198%	1.26%	35,357,818.22	260,358,000
61	TAULO	225,000,000	1246	0.841%	0.210%	877	1.359%	0.476%	4.15	0.25%	0.02%	39.56	0.941%	0.282%	0.99%	27,808,168.41	252,808,000
62	BOLANG	225,000,000	1486	1.003%	0.251%	380	0.589%	0.206%	6.09	0.37%	0.04%	25.19	0.599%	0.180%	0.67%	18,852,004.40	243,852,000
	KEC. BUNGIN	1,350,000,000														174,308,696	1,524,309,000
63	BUNGIN	225,000,000	1455	0.983%	0.246%	1131	1.752%	0.613%	86.00	5.16%	0.52%	38.58	0.918%	0.275%	1.65%	46,218,553.64	271,219,000
64	TALANG RILAU	225,000,000	485	0.328%	0.082%	488	0.756%	0.265%	20.53	1.23%	0.12%	51.90	1.235%	0.370%	0.84%	23,524,680.80	248,525,000
65	BARUKA	225,000,000	648	0.438%	0.109%	303	0.469%	0.164%	57.31	3.44%	0.34%	50.23	1.195%	0.358%	0.98%	27,335,314.57	252,335,000
66	BANUA	225,000,000	529	0.357%	0.089%	513	0.795%	0.278%	54.00	3.24%	0.32%	48.24	1.147%	0.344%	1.04%	29,007,715.13	254,008,000
67	SAWITO	225,000,000	701	0.473%	0.118%	617	0.956%	0.335%	12.50	0.75%	0.08%	50.67	1.205%	0.362%	0.89%	24,908,012.85	249,908,000
68	BULO	225,000,000	625	0.422%	0.106%	633	0.981%	0.343%	6.50	0.39%	0.04%	48.33	1.149%	0.345%	0.83%	23,314,418.92	248,314,000
	KEC. CENDANA	1,575,000,000														149,008,381	1,724,010,000
69	CENDANA	225,000,000	1576	1.064%	0.266%	1040	1.611%	0.564%	10.62	0.64%	0.06%	22.05	0.525%	0.157%	1.05%	29,432,852.13	254,433,000
70	TAULAN	225,000,000	2005	1.354%	0.338%	232	0.359%	0.126%	10.19	0.61%	0.06%	23.33	0.555%	0.166%	0.69%	19,374,510.20	244,375,000
71	PINANG	225,000,000	970	0.655%	0.164%	589	0.913%	0.319%	14.51	0.87%	0.09%	25.97	0.618%	0.185%	0.76%	21,157,561.18	246,158,000
72	MALALIN	225,000,000	708	0.478%	0.120%	322	0.499%	0.175%	11.50	0.69%	0.07%	39.96	0.951%	0.285%	0.65%	18,154,628.95	243,155,000
73	KARRANG	225,000,000	957	0.646%	0.162%	377	0.584%	0.204%	21.68	1.30%	0.13%	31.06	0.739%	0.222%	0.72%	20,098,740.10	245,099,000
74	LEBANG	225,000,000	1036	0.700%	0.175%	409	0.634%	0.222%	10.41	0.63%	0.06%	35.54	0.845%	0.254%	0.71%	19,959,102.63	244,959,000
75	PUNDI LEMO	225,000,000	1573	1.062%	0.266%	353	0.547%	0.191%	12.10	0.73%	0.07%	30.03	0.714%	0.214%	0.74%	20,830,986.29	245,831,000
	KEC. CURIO	2,475,000,000														292,858,836	2,767,858,000
76	SENGLEPOPONGAN	225,000,000	1435	0.969%	0.242%	257	0.398%	0.139%	22.36	1.34%	0.13%	48.84	1.162%	0.348%	0.86%	24,202,597.46	249,203,000
77	BUNTU BARANA	225,000,000	2425	1.638%	0.409%	682	1.057%	0.370%	25.32	1.52%	0.15%	38.45	0.915%	0.274%	1.21%	33,757,908.59	258,758,000
78	BUNTU PEMA	225,000,000	2065	1.394%	0.349%	702	1.088%	0.381%	8.34	0.50%	0.05%	52.27	1.243%	0.373%	1.15%	32,265,497.93	257,265,000
79	PAROMBEAN	225,000,000	1495	1.010%	0.252%	932	1.444%	0.505%	25.08	1.51%	0.15%	42.97	1.022%	0.307%	1.22%	34,021,315.67	259,021,000
80	TALLUNG URA	225,000,000	1092	0.737%	0.184%	466	0.722%	0.253%	24.51	1.47%	0.15%	41.21	0.980%	0.294%	0.88%	24,592,141.64	249,592,000
81	PEBALORAN	225,000,000	2001	1.351%	0.338%	580	0.899%	0.315%	15.04	0.90%	0.09%	37.84	0.900%	0.270%	1.01%	28,354,259.45	253,354,000
82	CURIO	225,000,000	1449	0.978%	0.245%	397	0.615%	0.215%	29.34	1.76%	0.18%	58.07	1.381%	0.414%	1.05%	29,413,506.87	254,414,000
83	MEKKALA	225,000,000	1009	0.681%	0.170%	272	0.421%	0.148%	7.10	0.43%	0.04%	52.88	1.258%	0.377%	0.74%	20,658,023.57	245,658,000
84	SUMBANG	225,000,000	1282	0.866%	0.216%	675	1.046%	0.366%	1.77	0.11%	0.01%	32.49	0.773%	0.232%	0.82%	23,098,429.43	248,098,000
85	MANDALAN	225,000,000	741	0.500%	0.125%	387	0.600%	0.210%	6.20	0.37%	0.04%	53.23	1.266%	0.380%	0.75%	21,057,730.24	246,058,000
86	SALASSA	225,000,000	926	0.625%	0.156%	318	0.493%	0.172%	13.45	0.81%	0.08%	49.90	1.187%	0.356%	0.77%	21,437,425.19	246,437,000
	KEC. MALUA	1,575,000,000														119,513,582	1,694,514,000
87	BONTO	225,000,000	595	0.402%	0.100%	487	0.755%	0.264%	3.80	0.23%	0.02%	38.50	0.916%	0.275%	0.66%	18,538,146.22	243,538,000
88	TALLUNG TONDOK	225,000,000	1220	0.824%	0.206%	242	0.375%	0.131%	5.02	0.30%	0.03%	27.34	0.650%	0.195%	0.56%	15,748,671.35	240,749,000
89	RANTE MARIO	225,000,000	847	0.572%	0.143%	169	0.262%	0.092%	3.38	0.20%	0.02%	30.83	0.733%	0.220%	0.47%	13,298,504.95	238,299,000
90	TANGRU	225,000,000	1279	0.864%	0.216%	436	0.676%	0.236%	6.10	0.37%	0.04%	26.83	0.638%	0.191%	0.68%	19,052,959.13	244,053,000
91	KOLAI	225,000,000	822	0.555%	0.139%	403	0.624%	0.219%	3.81	0.23%	0.02%	36.68	0.872%	0.262%	0.64%	17,973,445.79	242,973,000
92	DULANG	225,000,000	986	0.666%	0.166%	270	0.418%	0.146%	7.40	0.44%	0.04%	36.14	0.860%	0.258%	0.62%	17,225,013.50	242,225,000
93	BUNTU BATUAN	225,000,000	752	0.508%	0.127%	378	0.586%	0.205%	5.60	0.34%	0.03%	37.24	0.886%	0.266%	0.63%	17,676,840.92	242,677,000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)
	KEC. BUNTU BATU	1,800,000,000														268,316,788	2,068,316,000
94	PASUI	225,000,000	2270	1.533%	0.383%	1258	1.949%	0.682%	6.03	0.36%	0.04%	30.80	0.733%	0.220%	1.32%	36,999,060.65	261,999,000
95	ERAN BATU	225,000,000	1048	0.708%	0.177%	946	1.466%	0.513%	16.25	0.98%	0.10%	36.32	0.864%	0.259%	1.05%	29,307,971.32	254,308,000
96	LATIMOJONG	225,000,000	2416	1.631%	0.408%	1098	1.701%	0.595%	19.98	1.20%	0.12%	41.81	0.994%	0.298%	1.42%	39,805,474.91	264,805,000
97	BUNTU MONDONG	225,000,000	1637	1.105%	0.276%	651	1.009%	0.353%	20.21	1.21%	0.12%	36.46	0.867%	0.260%	1.01%	28,305,614.69	253,306,000
98	LEDAN	225,000,000	1489	1.006%	0.251%	413	0.640%	0.224%	25.43	1.53%	0.15%	37.19	0.885%	0.265%	0.89%	25,016,425.86	250,016,000
99	LUNJEN	225,000,000	1703	1.150%	0.288%	1126	1.745%	0.611%	7.48	0.45%	0.04%	34.26	0.815%	0.244%	1.19%	33,249,131.34	258,249,000
100	LANGDA	225,000,000	1241	0.838%	0.210%	1151	1.783%	0.624%	9.75	0.59%	0.06%	41.49	0.987%	0.296%	1.19%	33,271,432.43	258,271,000
101	POTOK ULIN	225,000,000	1678	1.133%	0.283%	1438	2.228%	0.780%	21.52	1.29%	0.13%	44.93	1.069%	0.321%	1.51%	42,361,676.58	267,362,000
	KEC. MASALLE	1,350,000,000														193,050,074	1,543,050,000
102	MASALLE	225,000,000	2788	1.883%	0.471%	933	1.446%	0.506%	16.75	1.01%	0.10%	33.41	0.795%	0.238%	1.32%	36,837,292.13	261,837,000
103	BATU KE'DE	225,000,000	2124	1.434%	0.359%	621	0.962%	0.337%	8.87	0.53%	0.05%	35.24	0.838%	0.251%	1.00%	28,001,452.25	253,001,000
104	MUNDAN	225,000,000	1777	1.200%	0.300%	1272	1.971%	0.690%	11.25	0.68%	0.07%	41.44	0.986%	0.296%	1.35%	37,885,536.76	262,886,000
105	BUNTU SARONG	225,000,000	2337	1.578%	0.395%	721	1.117%	0.391%	9.25	0.56%	0.06%	31.18	0.742%	0.222%	1.06%	29,779,899.78	254,780,000
106	RAMPUNAN	225,000,000	2028	1.369%	0.342%	824	1.277%	0.447%	13.00	0.78%	0.08%	41.61	0.990%	0.297%	1.16%	32,598,217.67	257,598,000
107	TONGKONAN BASSE	225,000,000	1751	1.182%	0.296%	666	1.032%	0.361%	9.23	0.55%	0.06%	40.07	0.953%	0.286%	1.00%	27,947,674.96	252,948,000
	KEC. BAROKO	1,125,000,000														118,219,700	1,243,219,000
108	BAROKO	225,000,000	2096	1.415%	0.354%	220	0.341%	0.119%	9.40	0.56%	0.06%	32.66	0.777%	0.233%	0.76%	21,354,343.50	246,354,000
109	BENTENG ALA	225,000,000	1738	1.174%	0.293%	153	0.237%	0.083%	8.93	0.54%	0.05%	39.31	0.935%	0.280%	0.71%	19,893,856.11	244,894,000
110	BENTENG ALLA UTARA	225,000,000	2265	1.530%	0.382%	403	0.624%	0.219%	11.14	0.67%	0.07%	39.13	0.931%	0.279%	0.95%	26,516,868.26	251,517,000
111	TONGKO	225,000,000	3237	2.186%	0.546%	599	0.928%	0.325%	9.41	0.57%	0.06%	28.94	0.688%	0.207%	1.13%	31,761,398.86	256,761,000
112	PATONGLOAN	225,000,000	1214	0.820%	0.205%	164	0.254%	0.089%	2.20	0.13%	0.01%	50.52	1.202%	0.361%	0.67%	18,693,233.05	243,693,000
Total		25,200,000,000	148,085	1.00	0.25	64,542	1.00	0.35	1,665	1.00	0.10	4,204	1.00	0.30	1.00	2,800,000,000	28,000,000,000

Kontrol Penghitungan

Pagu Dana Desa Kabupaten X

(c)

Bobot

(g)

Pagu Alokasi Dasar (90%)

(d)

(h)

Pagu Bagian Formula (10%)

(e)

(i)

Jumlah Desa

(f)

(j)

Paraf Koordinasi	
SKPD/Kabag	Paraf/Tgl
1. SKPD TERRAIT	10/4/17
2. KABAG TERRAIT	
3. KABAG HUKUM	10/4/17

BUPATI ENREKANG,

MUSLIMIN BANDO